



International
Labour
Organization

100
1919 • 2019

Peringatan 100 tahun ILO:

Memajukan Keadilan Sosial, Mempromosikan Pekerjaan yang Layak



Peringatan 100 tahun ILO: Memajukan Keadilan Sosial, Mempromosikan Pekerjaan yang Layak

ILO, badan khusus PBB untuk dunia kerja, merayakan ulang tahunnya yang ke-100 sepanjang tahun 2019. Tahun ke-100 ini juga disebut sebagai “ILO100” dengan tema: Memajukan keadilan sosial, mempromosikan pekerjaan yang layak’.

Tema ini menggemakan resolusi Konferensi ILO tentang Memajukan Keadilan Sosial melalui Pekerjaan Layak (2016), dan menegaskan kembali relevansi mandat keadilan sosial dan Agenda Pekerjaan Layak ILO.

Tujuan dari 100 tahun ILO adalah:

- ♦ Meningkatkan visibilitas ILO dan menegaskan kembali relevansinya
- ♦ Membangun dukungan yang lebih kuat untuk mandat keadilan sosial dan Agenda Pekerjaan Layak ILO
- ♦ Memetakan cara untuk masa depan Organisasi ILO di abad kedua

Sejarah ILO

Lahir dari abu Perang Dunia Pertama, ILO dibentuk pada 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri perang tersebut. ILO didirikan dengan keyakinan bahwa keadilan sosial sangat penting untuk perdamaian universal dan abadi. ILO menjadi badan khusus PBB pertama pada 1946.

Sebagai badan khusus PBB untuk ketenagakerjaan, ILO menetapkan standar perburuhan internasional, mempromosikan hak-hak di tempat kerja dan mendorong kesempatan untuk pekerjaan layak, peningkatan perlindungan sosial dan penguatan dialog tentang isu-isu terkait pekerjaan.



Pada Juni 2018, ILO telah **mengadopsi 189 Konvensi dan 205 Rekomendasi**, yang telah **menjadi kerangka acuan** untuk undang-undang ketenagakerjaan di tingkat nasional.

Program Internasional ILO tentang Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) telah berkontribusi **mengeluarkan lebih dari 86 juta anak** dari situasi pekerja anak di seluruh dunia.

Dengan bantuan dan layanan ILO, sekitar 85 persen dari negara-negara anggota ILO **telah berhasil menciptakan lembaga tripartit untuk menangani masalah-masalah terkait ketenagakerjaan**.

Sebagian besar negara **memiliki skema perlindungan sosial** yang tertambat dalam undang-undang nasional, yang **mencakup semua atau sebagian besar bidang kebijakan perlindungan sosial**. 45 persen populasi global secara efektif dilindungi oleh setidaknya satu manfaat perlindungan sosial, lebih dari 29 persen populasi dunia dengan sistem jaminan sosial komprehensif dan 68 persen lansia di seluruh dunia menerima pensiun.

Jutaan orang dapat keluar dari kemiskinan melalui pekerjaan dan lapangan kerja yang layak.

Program dan kegiatan ILO **mempengaruhi seluruh kehidupan** kita termasuk, misalnya, **jam kita bekerja dan beristirahat, keselamatan dan kesehatan kita di tempat kerja, pekerjaan dan upah, serta pensiun kita serta kondisi kerja keseluruhan**, di antaranya.



Beberapa tonggak penting ILO adalah sebagai berikut:

- ♦ Deklarasi Philadelphia (1944) menempatkan sejumlah prinsip utama yang mewujudkan upaya-upaya ILO, termasuk prinsip bahwa tenaga kerja bukanlah komoditas. Deklarasi ini menetapkan hak asasi manusia dan ekonomi dasar untuk ditegakkan oleh negara.
- ♦ ILO dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 1969 pada ulang tahunnya yang ke-50.
- ♦ Deklarasi tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja (1998) menciptakan seperangkat standar kerja inti.
- ♦ Deklarasi tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil (2008) menguraikan visi kontemporer dari mandat ILO di era globalisasi, dengan pekerjaan yang layak sebagai pusatnya.
- ♦ Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (2015) menempatkan pekerjaan yang layak untuk semua di jantung kebijakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.



Tujuh Prakarsa ILO Seratus Tahun

Hingga tahun 2019, tujuh Inisiatif Seratus Tahun sedang dilaksanakan.

- 1. Prakarsa Pekerjaan Masa Depan**
- 2. Prakarsa Mengakhiri Kemiskinan**
- 3. Prakarsa Perempuan di Tempat Kerja**
- 4. Prakarsa Hijau**
- 5. Prakarsa Standar**
- 6. Prakarsa Perusahaan**
- 7. Prakarsa Pemerintahan**

Prakarsa Pekerjaan Masa Depan adalah inti dari kegiatan ILO untuk menandai satu abad ILO.

Komisi Global untuk Pekerjaan Masa Depan didirikan di bawah Prakarsa Pekerjaan Masa Depan guna melakukan kajian mendalam tentang pekerjaan di masa depan dan memberikan dasar analitis dalam rangka merancang pekerjaan masa depan yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai ILO. Laporan Komisi Global menjadi fokus utama tahun ke-100, dan akan diserahkan pada sesi 100 tahun dari Konferensi Perburuhan Internasional pada Juni 2019 sebagai dasar penerbitannya.

Sementara pekerjaan masa depan akan menjadi inti utama dari perayaan seratus tahun, peringatan ke-100 ini juga akan memiliki cakupan yang lebih luas, menampilkan fitur inisiatif seratus tahun dan beragam kegiatan lainnya dengan perspektif historis dan masukan utama dari tingkat nasional.

Kantor ILO telah menetapkan pengaturan kelembagaan untuk persiapan yang efektif dari perayaan seratus tahun ini, termasuk satu gugus tugas pekerjaan masa depan dan satu gugus tugas lainnya untuk ILO 2019. Gugus tugas ILO 2019 bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan dan koordinasi pendekatan dan kegiatan ILO menjelang dan selama 2019.

Menuju Abad ke-21

Deklarasi Philadelphia diadopsi oleh ILO pada 1944. Deklarasi Philadelphia menetapkan bahwa tenaga kerja bukanlah komoditas, bahwa kebebasan berekspresi dan berserikat sangat penting untuk kemajuan yang berkelanjutan dan bahwa kemiskinan di mana pun merupakan bahaya bagi kesejahteraan di mana pun. Ketika kita melihat masa depan dari pekerjaan dan masyarakat kita, prinsip-prinsip yang

dikemukakan oleh Deklarasi Philadelphia menjadi lebih relevan dari sebelumnya.

Namun, dunia kerja menghadapi perubahan dan tantangan besar seperti robotisasi, transisi menuju ekonomi hijau dan munculnya apa yang disebut “ekonomi yang bergerak cepat” yang mengarah pada perubahan cepat dalam hubungan tradisional antara pengusaha dan pekerja. Kita membutuhkan ILO yang kuat untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dan mengejar upaya menuju pekerjaan yang lebih layak dan keadilan sosial.

ILO tidak hanya sadar akan tantangan-tantangan ini tetapi juga menjadi yang terdepan dalam penelitian tentang topik-topik ini. ILO menjadi pusat pengetahuan dan sekaligus organisasi yang memberikan dampak langsung pada kehidupan pekerja perempuan dan laki-laki, terutama melalui standar perburuhan internasional yang memberikan banyak dampak pada kehidupan sehari-hari dari jutaan orang di seluruh dunia.

Konvensi dan rekomendasi baru mencerminkan isu-isu terkini seperti transisi dari perekonomian informal ke ekonomi formal, terus adanya kerja paksa dan kebutuhan untuk mengatasi pelecehan seksual. Melalui kemitraan internasional seperti Koalisi Internasional Upah Setara (EPIC), kami juga memperjuangkan upah yang sama untuk perempuan dan laki-laki.

Pencapaian utama ILO dan Indonesia

- ♦ Indonesia telah menjadi anggota ILO sejak 11 Juni 1950. Pada tahun yang sama, Indonesia meratifikasi Konvensi ILO pertamanya: Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa (salah satu dari delapan Konvensi inti ILO). Dalam beberapa tahun, Indonesia meratifikasi dua Konvensi inti ILO lainnya: Konvensi ILO No. 98 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama pada tahun 1957 dan No. 100 tentang remunerasi yang sama pada tahun 1958.
-
- ♦ Pada tahun 1970, ILO mendirikan kantor di Jakarta. Sejak 2003, Kantor ILO Jakarta telah mencakup Indonesia dan Timor-Leste.
-
- ♦ Tahun milenium 2000 menandai pencapaian Indonesia sebagai negara Asia pertama yang meratifikasi kesemua delapan Konvensi mendasar ILO setelah ratifikasi Konvensi No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di tahun 2000, ratifikasi tiga Konvensi inti di 1999 (Konvensi Penghapusan Kerja Paksa No. 105, Diskriminasi Sehubungan dengan Pekerjaan dan Jabatan No. 111 serta Usia Minimum untuk Bekerja No. 138).

- ♦ Indonesia adalah aktor penting dalam perdagangan maritim internasional, dan meratifikasi Konvensi Perburuhan Maritim ILO (MLC, 2006) pada 2017. Ratifikasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai pekerjaan yang layak bagi para pelaut dan untuk memastikan persaingan yang adil bagi pemilik kapal yang berkualitas.
-
- ♦ Pada 2015, Indonesia juga meratifikasi Konvensi ILO No. 187 tentang Kerangka Promosi untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai salah satu instrumen penting ILO dalam keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Melalui ratifikasi, Pemerintah Indonesia, melalui kemitraan dengan mitra sosial, memperkuat komitmennya untuk mencapai peningkatan K3 yang berkelanjutan dan berkesinambungan guna mencegah kecelakaan, penyakit, dan kematian akibat pekerjaan.
-
- ♦ Menyusul berlakunya Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004, Indonesia telah menyelesaikan program reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai awal terhadap komitmen reformasi untuk

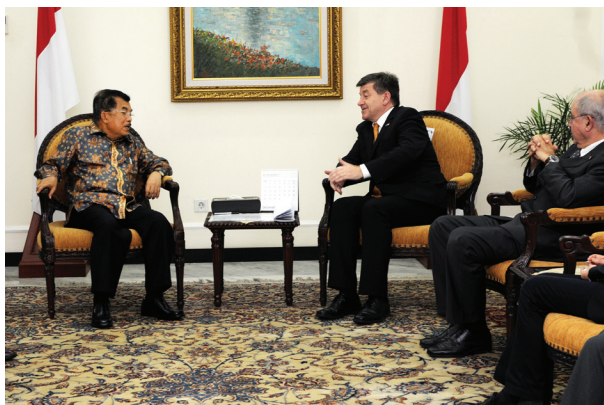
meratifikasi dan mengimplementasikan semua Konvensi mendasar ILO (dengan berlakunya Undang-Undang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh 21/2000 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003).

- ♦ Dimulai pada 1998, reformasi juga menandai awal dari sistem hubungan industrial yang lebih demokratis di Indonesia. Setelah 20 tahun reformasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan konfederasi serikat pekerja utama (seperti KSPSI, KSBSI, KSPI dan konfederasi baru lainnya) telah memperkuat kapasitas dan peran mereka dalam mempengaruhi kebijakan dan undang-undang ketenagakerjaan melalui sistem dialog sosial yang lebih baik.
- ♦ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-100 yang bersejarah di Jenewa pada 14 Juni 2011. Kunjungan bersejarah ini menandai pertama kalinya Presiden



Indonesia berbicara dalam konferensi tersebut.

- ♦ Tiga tahun kemudian, pada bulan Desember 2014, Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder, mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini juga menandai kunjungan pertama Direktur Jenderal ILO ke Indonesia.



- ♦ Indonesia telah membuat komitmen dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2022, dan telah mengidentifikasi pengurangan kemiskinan dan pendidikan sebagai strategi kunci untuk mencapai tujuan ini. Kolaborasi antara Indonesia dan ILO selama

dua dasawarsa terakhir telah meletakkan dasar yang kuat pada upaya ini, dan telah menekankan sejumlah arah utama untuk pengembangan kebijakan pendidikan masa depan sebagai instrumen yang efektif dalam menghapuskan pekerja anak.

- ♦ Pada 2003, Indonesia menjadi negara terdepan dalam Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda setelah mendirikan Jejaring Lapangan Kerja Kaum Muda Indonesia (IYEN). Indonesia juga mengadopsi Rencana Aksi Nasional untuk mengatasi tantangan pengangguran kaum muda. Dengan dukungan dari ILO, Indonesia membentuk Sekretariat Jejaring Ketenagakerjaan Muda Indonesia di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- ♦ Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan pada 2015 telah meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyediaan skema pensiun. Skema yang diperbaiki ini telah menandai reformasi sistem jaminan sosial Indonesia dan telah menggarisbawahi kolaborasi antara Indonesia dan ILO selama tiga dekade terakhir. Kolaborasi ini telah meletakkan fondasi yang kuat dan

menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial untuk semua.

- ♦ Menyadari peran pekerja migran Indonesia terhadap perekonomian negara dan masyarakat, Indonesia terus memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Indonesia dan ILO terus berkolaborasi dalam migrasi tenaga kerja dalam upaya menyediakan migrasi yang aman dan adil bagi semua.
 - ♦ Program Infrastruktur Padat Karya Kementerian Ketenagakerjaan mengadopsi konsep ILO berbasis sumber daya lokal (LRB) untuk mendukung peningkatan kualitas aset dan peluang kerja yang dihasilkan. Adopsi ini didasarkan pada proyek-proyek yang dilaksanakan oleh ILO mulai 2006 dan seterusnya yang menunjukkan penerapan pendekatan LRB dalam pemulihan bencana dan mitigasi perubahan iklim di Aceh dan Nias serta Kepulauan Mentawai.
-

- ♦ Penandatanganan Komitmen Tripartit tahun 2003 untuk Memerangi HIV dan AIDS di Dunia Kerja oleh Pemerintah Indonesia, organisasi pekerja dan pengusaha, dan diberlakukannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 68/2004 tentang HIV dan AIDS Pencegahan dan Pengendalian di Tempat Kerja menyoroti pentingnya kolaborasi sektor swasta dengan pekerja dalam mencegah penyebaran HIV dan AIDS di tempat kerja.



ILO Kantor Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250
Telp. +62 21 391 3112; Faks. +62 21 3983 8959
Email: jakarta@ilo.org; Situs: www.ilo.org/jakarta